

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL JAWA BARAT

Taufik Hidayat¹, Maulina Dyah Permatasari², Puspita Aeni³

¹⁻⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa

Correspondences: taufik.hidayat@pelitabangsa.ac.id

Artikel Masuk: 30 Juli 2024

Artikel Direview: 31 Juli 2024

Artikel Diterima: 19 Agustus 2024

Artikel dapat diakses : [Archives | Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa \(jppmpelitabangsa.id\)](#)

ABSTRAK

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan terdapat batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai sumber pembiayaan juga pengukuran kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja modal baik untuk kelancaran urusan pemerintahan maupun peningkatan sarana dan prasarana publik. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diprosikan oleh rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan software SPSS versi 26. Menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter serta menggunakan teknik total sampling sehingga didapat 81 sampel yang terdiri dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019 – 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan dan Rasio Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

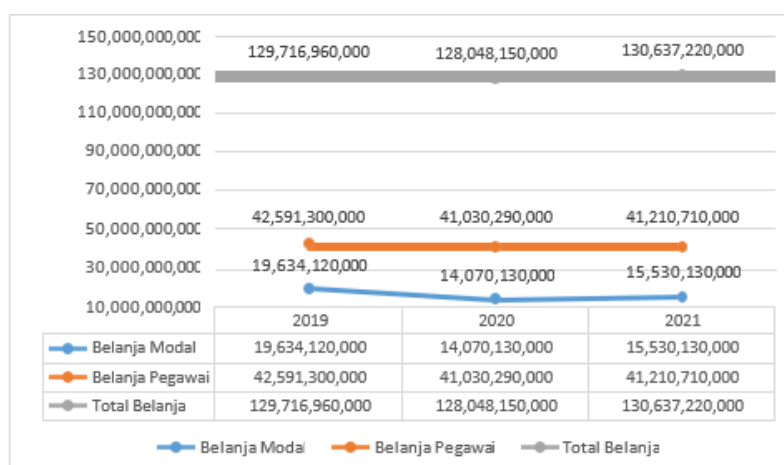
Capital expenditure is part of regional expenditure which is used to budget expenditures made in the context of procuring fixed assets and other fixed assets which have a useful life of more than 12 (twelve) months, are used in local government activities and is a regulated minimum capitalization of fixed assets. in regional regulations. Factors that affect capital expenditure include the influence of general allocation funds (DAU), regional original income (PAD), and regional government financial performance as a source of financing as well as the measurement of regional financial performance in the implementation of capital expenditure both for the smooth running of government affairs and for improving facilities and infrastructure public. Financial performance in this study is proxied by the independence ratio, the PAD effectiveness ratio, the degree of fiscal decentralization, and the dependency ratio. The purpose of this study was to examine the effect of general allocation funds (DAU), regional original income (PAD), and local government financial performance on capital expenditure. This research is quantitative using SPSS version 26 software. It uses secondary data with data collection techniques using the documentary method. It uses a total sampling technique so that 81 samples consisting of 27 District and City Governments in West Java Province are obtained for the period 2019–2021. The results found that PAD and DAU partially significantly affected capital expenditure. Regional Government Financial Performance in the form of Dependency Ratio and Fiscal Decentralization Ratio partially has a significant effect on capital expenditure. Meanwhile, the Regional Government's Financial Performance in the form of the Independence Ratio and the PAD Effectiveness Ratio partially have no impact on Capital Expenditures.

Keywords: Capital Expenditure, General Allocation Fund, Regional Original Revenue, Local Government Financial

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada awal tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid 19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar - 2,07 persen (BPS.go.id, 2021). Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Melihat kontraksi pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Kebijakan dari pemerintah adalah mengalokasikan dana APBN dan mendelegasikan sebagian dari otoritas pengelolaan keuangannya kepada daerah dengan keyakinan bahwa daerah dapat membiayai berbagai inisiatif pembangunan dan layanan masyarakat berdasarkan kemampuan mereka sendiri.

Peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah dimulai dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas, hak, dan kekuasaan suatu daerah untuk mengatur dirinya sendiri dan bertindak untuk kepentingan umum dikenal sebagai "otonomi daerah." Dengan kata lain otonomi daerah dijalankan dengan maksud mengembangkan potensi daerah, menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya daerah, serta indikator kemandirian pemerintah daerah (Hastuti, 2018). Pengalokasian belanja modal secara mandiri termasuk salah satu wujud dari otonomi daerah. Akuisisi aset tetap yang digunakan untuk pembangunan daerah seringkali merupakan mayoritas dari belanja modal. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal keuangan daerah. Perkembangan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh seberapa baik keuangannya dikelola.



Gambar 1. Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2021

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2024)

Berdasarkan gambar 1, semua model belanja di Provinsi Jawa Barat banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan, sebaiknya APBD yang dialokasikan kepada belanja pegawai dikurangi, sehingga dapat diberikan kepada belanja modal yang sifatnya dapat digunakan dengan waktu lama. Meskipun fenomena ini terjadi pada beberapa pemerintah daerah, akan tetapi hal ini merupakan sebuah permasalahan karena idealnya peningkatan atau besarnya penerimaan juga diikuti dengan peningkatan belanja modal. Selain itu juga terjadi fluktuasi pada belanja modal. Suntikan dana dari pemerintah pusat

melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sangat diperlukan untuk membangun pemerintah daerah (Kristianus, 2022).

Berdasarkan pendapat Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa perjalanan dinas tampaknya menggunakan sekitar 13,4 persen dari dana APBD (Kristianus, 2022). Selanjutnya, menyumbang sekitar 17,5% dari layanan kantor. Saat ini, besarnya belanja pegawai mencapai sekitar 36%. Menteri keuangan mencapai kesimpulan bahwa sekitar 70% dari belanja APBD langsung digunakan untuk kebutuhan pegawai pemerintah daerah. Menurutnya, ironisnya masyarakat hanya menerima sepertiganya atau 30% saja. Ia mengatakan bahwa bagian dari anggaran tersebut harus diubah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jelas bahwa belanja modal, yang memiliki peranan yang sangat penting serta memiliki pengaruh besar bagi pembangunan daerah malah mendapatkan porsi yang kecil.

Pemanfaatan belanja harus difokuskan pada hal-hal produktif seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan pertanian, serta perikanan dan kelautan. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, sekitar 60 persen dari total 2.360 kilometer jalan di Jawa Barat akan memasuki batas umur konstruksi. Jalan-jalan yang telah mencapai batas umur konstruksi harus dibongkar dan dibangun kembali (Fikri, 2019).

Belanja modal juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. PAD dijadikan alternatif sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintah dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan daerah pada subsidi pemerintah pusat. PAD bisa menjadi suatu masalah yang utama (Yahya, 2020). Semakin besar peranan PAD didalam kerangka keuangan daerah semakin tinggi juga kapasitas keuangan yang dimiliki daerah (Rizal & Eripta, 2019).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Karyadi & Taman, 2018), PAD memiliki pengaruh positif juga signifikan terhadap belanja modal. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azhar & Hermanto, 2021) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Selain PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) juga dapat menunjang pemerintahan daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jumlah total alokasi anggaran negara yang digunakan untuk menyeimbangkan sumber daya keuangan daerah dan menyediakan kebutuhan staf dan peralatan dari prakarsa desentralisasi (Hastuti, 2018). Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Alokasi umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan asli daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya (Karyadi & Taman, 2018). Penelitian (Karyadi & Taman, 2018) menyebutkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif juga signifikan terhadap belanja modal.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryani & Pariani, 2018) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel DAU mengalami pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Kemudian naik turunnya anggaran belanja modal pada daerah Provinsi Jawa Barat seperti ini akan berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintahan karena belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, dan sebaliknya. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan.

Dana alokasi umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat ditujukan untuk pemerataan kekuatan keuangan pada setiap pemda sehingga diharapkan tidak ada ketimpangan keuangan antar pemda. Dengan adanya dana perimbangan yang besar, setiap daerah dapat dialokasikan salah satunya untuk belanja modal. Selaras dengan PAD, semakin besar dana perimbangan yang diterima suatu pemda seharusnya mampu meningkatkan jumlah belanja modal suatu daerah tersebut. Akan tetapi, jika dilihat dari djpk.kemenkeu.go.id, jumlah Belanja Modal Provinsi Jawa Barat cenderung turun sejak 2019 hingga 2021. Padahal jika ditinjau dari jumlah dana perimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat cenderung besar dan meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa Provinsi baik Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki kinerja keuangan yang rendah. Rendahnya kinerja keuangan tersebut akan berdampak terhadap kemandirian daerah Provinsi Jawa Barat dalam membiayai keperluan belanja yang menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sedangkan, pemerintah memiliki instrumen kebijakan desentralisasi fiskal yang berarti penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan (Putri & Rahayu, 2019) menunjukkan kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, secara simultan juga berpengaruh. Sedangkan penelitian (Devi et al., 2022) bahwa rasio ketergantungan pada keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

Selain itu, alasan peneliti menggunakan Provinsi Jawa Barat dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa perbedaan dan prestasi dibandingkan dengan provinsi lain khususnya pada tahun 2019-2021. Pada 2020, ITB dari Bandung menduduki peringkat ke-50 dalam QS World University Rankings yang mencerminkan kualitas pendidikan tinggi di provinsi ini. Lalu, Jabar memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan kontribusi dari berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Pada 2021, Jabar berhasil menarik investasi dalam skala besar, memperkuat daya saing ekonomi daerah (Jabarprov.go.id, 2023). Saat pandemi, Jabar menghadapi tantangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah provinsi secara aktif berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus dengan langkah-langkah seperti pembatasan sosial dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Jabar juga berusaha mengembangkan inovasi teknologi dalam beberapa sektor, termasuk pertanian dan pelayanan publik (Hapsari et al., 2023). Hal tersebut termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Provinsi Jawa Barat kurang mampu dalam mengatur anggaran belanja modal yang akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan wilayahnya. Sedangkan, belanja modal sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui beberapa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, seperti penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Sehingga, untuk dapat menyusun jumlah anggaran belanja modal dengan tepat yaitu dengan cara meningkatkan kinerja keuangan daerah pada Provinsi Jabar. (Azhar & Hermanto, 2021) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini bertujuan untuk menambah aset tetap yang dimiliki.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka. Dimulai dari mengumpulkan data, menafsirkan data dan menampilkan hasilnya. Data kuantitatif biasanya berbentuk angka ataupun nilai yang diperoleh dari teknik pengumpulan data. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjabarkan dengan teknis matematis karena penelitian ini memakai teori secara hipotesis, yang memiliki kaitan dengan keadaan yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data sekunder.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN, untuk membenarkan bahwa semua daerah memiliki akses ke pendanaan yang cukup.	DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah dihasilkan oleh daerah dan berdasarkan peraturan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan yang sah	PAD = Total Pajak Daerah + Total Retribusi Daerah + Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain - lain pendapatan daerah yang sah	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian (RKM)	Rasio kemandirian keuangan merupakan tujuan penting dalam mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.	Rasio Kemandirian = PAD : Transfer Pusat + Provinsi x 100 %	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD (REF)	Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.	Rasio Efektivitas PAD = Realisasi PAD : Target penerimaan PAD x 100%	Rasio

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan (RKT)	Rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan perbandingan jumlah pendapatan transfer ke daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah.	Rasio ketergantungan = $\frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF)	Rasio Desentralisasi Fiskal menggambarkan kemampuan sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhandaerah dari segi finansial.	Rasio DesentralisasiFiskal = $\frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$	Rasio
Belanja Modal (BM)	Belanja modal digunakan dalam proses penganggaran untuk memperhitungkan biaya yang terkait dengan perolehan asetjangka panjang dan dengan masa manfaatlebih dari satu tahun	BM = Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja ModalGedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja ModalAset Tetap Lainnya + Belanja ModalAset Tak Berwujud	Rasio

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan meliputi seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu penelitian yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu strategi untuk menentukan ukuran sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data sekunder digunakan untuk penyelidikan ini. Data tersebut berasal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 2019 – 2021. Di penelitian ini menggunakan metode dokumentasi melalui data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikumpulkan, dicatat, kemudian dikaji sehingga dapat diolah untuk kepentingan penelitian.

Untuk mengelola data dalam penelitian ini dibutuhkan alat-alat pendukung untuk memperoleh hasil dari pengelolaannya meliputi Microsoft Excel dan program aplikasi SPSS, kemudian akan dilakukan pengujian asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis meliputi regresi linear berganda yang terdiri dari uji t dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	81	346.71	2159.83	1143.4419	441.80468
PAD	81	100.75	3761.91	855.7809	809.41553
RKM	81	5.92	73.54	25.0668	17.57621
REF	81	42.16	145.34	96.9067	17.20952
RKT	81	15.84	76.26	59.1930	12.87596
RDS	81	6.70	73.79	22.7573	12.47088
BM	81	57.42	1701.25	539.4298	337.72877

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata variabel penelitian menunjukkan nilai yang

kurang dari nilai standar deviasi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian kurang bervariasi.

Tabel 3. Hasil Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik	Hasil uji	Ketentuan	Kesimpulan
Normalitas	Asymp sig (2-tailed) = 0.200	Nilai signifikan > 0.05	Data terdistribusi normal
Multikolinieritas	Variabel	Tolerance	VIF
	DAU	0.343	2.917
	PAD	0.126	7.944
	RKM	0.122	8.219
	REF	0.872	1.146
	RKT	0.234	4.267
Heteroskedastisitas	Variabel	Sig	
	DAU	0.345	Nilai signifikan > 0.05
	PAD	0.772	
	RKM	0.752	
	REF	0.051	
	RKT	0.441	
Autokorelasi	dU < DW < 4-dU = 1.7164 < 1.737 < 2.2836	dU < DW < 4-dU	Data terbebas dari gejala autokorelasi

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	B	t	Sig.
DAU	0.318	3.259	0.002
PAD	0.576	3.571	0.001
RKM	0.060	0.367	0.715
REF	0.089	1.458	0.149
RKT	-0.315	-2.661	0.010
RDS	-0.274	-2.039	0.045
Adjusted R Square	0.738		
Sig. F	0.000		

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada tabel 3, dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan kurang dari 0.05 terdapat pada variabel DAU (0.002); PAD (0.001); RKT (0.010), dan RDS (0.045). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan atas DAU, PAD, RKT, dan RDS terhadap BM. Sedangkan nilai signifikan RKM dan REF lebih dari 0.05 yaitu (0.715) dan (0.149). Hasil tersebut membuktikan bahwa RKM dan REF tidak mempengaruhi BM.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal dapat memberikan penjelasan bahwa dana alokasi umum memiliki keterkaitan dengan pembangunan

infrastruktur daerah (Juniawan, 2018). Tingginya kontribusi DAU yang didapatkan oleh masing-masing pemerintah daerah dapat dialokasi untuk membiayai perbaikan jalan tersebut secara bertahap, karena Silondae (2016) menyatakan bahwa dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan dan akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah dalam jangka panjang. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika DAU yang diterima oleh pemerintah daerah meningkat maka alokasi anggaran untuk belanja modal juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel DAU mengalami pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi dan Tamam (2017) yakni DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Terdapat pengaruh yang positif juga signifikan dari PAD pada Belanja Modal menunjukkan bahwa meningkatnya PAD diiringi dengan tingkat Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa pemda mampu mendistribusikan PAD untuk dimanfaatkan sebagai penambahan aset pemerintah daerah seperti pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, pembebasan lahan guna pembuatan jalan umum, serta pembangunan fasilitas publik lainnya melalui belanja modal. Dalam Stewardship teori, hubungan kontraktual antara principal (masyarakat) dengan steward dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan pra sarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedang kan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari PAD. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Jayanti (2020) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Begitu juga dengan riset Hairiyah, Malisan dan Fakhroni (2017) disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dan juga riset oleh Rizal dan Erpita (2019) yang menjelaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka belanja modal yang dianggarkan akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan kata lain, pemda kabupaten dan kota jawa barat tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih tergolong rendah. Kemungkinan hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah karena rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2016) kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dalam Hal ini menunjukkan bahwa naik atau turunnya belanja modal tidak dipengaruhi oleh peningkatan efektivitas PAD. Dengan membandingkan penerimaan realisasi PAD dengan target penerimaan PAD, maka efektivitas PAD dapat ditentukan. Kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD sesuai dengan tujuannya ditunjukkan oleh rasio efektivitas PAD. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jabar kurang berhasil mencapai PAD yang dimaksud dengan realisasi selama tahun anggaran 2019 - 2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajriati, Engkus, dan Anwar (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial terhadap belanja modal begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi, Masnila, dan Nurhasanah (2022) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan, maka alokasi belanja modal yang dilakukan akan rendah karena dana yang ada lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional. Ketergantungan keuangan daerah merupakan seberapa banyak uang transfer yang diterima setiap daerah dibandingkan dengan semua pendapatan daerah. Semakin besar presentase ini maka semakin tergantung pemerintah daerah baik kepada pemerintah pusat maupun daerah (Harahap, 2020). Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan belanja modal yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi selama tahun anggaran 2019 - 2021. Hasil riset ini sejalan dengan riset Sularso & Restianto (2011) yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap belanja modal begitu juga dengan penelitian Anggraeni (2016) bahwa rasio ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan pemda berupa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mampu membiayai seluruh atau sebagian besar belanja pemerintah daerah. Ketiga, terdapat kekurangan dalam mekanisme untuk menghitung dampak inefisiensi yang ditimbulkan oleh spillover dan eksternalitas, serta masih belum terbentuknya mekanisme validasi yang tepat terhadapnya. Dalam konteks ini, langkah-langkah lebih lanjut dan inovasi dalam pengelolaan barang publik, perencanaan keuangan daerah, serta evaluasi dampak ekonomi akan sangat relevan dalam memenuhi kriteria yang belum terpenuhi tersebut (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021). Hasil riset ini sejalan dengan riset Devi, Masnila & Nurhasanah (2022) bahwa derajat Desentralisasi fiskal memiliki hubungan signifikan dengan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa H6 diterima.

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa DAU, PAD, dan kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal. Hasil riset menunjukkan bahwa secara simultan variabel DAU, PAD, dan kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap variabel belanja modal.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan pengaruh positif DAU dan PAD terhadap BM. Sedangkan RKT dan RDS memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap BM. Berikutnya RKM dan REF terbukti tidak mempengaruhi BM. Keterbatasan dalam variabel kinerja keuangan pemda pada penelitian ini hanya menggunakan beberapa rasio saja sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti dengan lebih lengkap pada penggunaan rasionya. Saran untuk penelitian lanjutan yakni agar bisa merubah/menambah variabel independen yang ada dalam penelitian ini dengan variabel DAK, SILPA dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap belanja modal serta hubungan antar variabel tersebut.

REFERENSI

- Azhar, A. Al, & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85-92. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.10985>
- BPS.go.id. (2021). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html#:~:text=Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur,Juta atau US%243.911%2C7>
- Devi, A. S., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *γ787*, 4(8.5.2017), 2003-2005.
- Fikri, A. (2019). *60 Persen Jalan Provinsi Jabar Akan Memasuki Batas Umur Konstruksi*. Bisnis.Tempo.Co.
- Hapsari, N. W., Tl, E. W., & Gedeona, H. T. (2023). Optimization Of Monitoring And Evaluation Activities In The Regional Research. *Jurnal Media Administrasi Terapan : JMAT*, 04(1), 19-25.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784-799. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Jabarprov.go.id. (2023). *Laporan Realisasi Investasi*. <https://Dpmptsp.Jabarprov.Go.Id/>. <https://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/pages/detail/289-laporan-realisasi-investasi/325>
- Karyadi, S. A., & Taman, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(3), 1-15. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13795>
- Kristianus, A. (2022). *Pembatasan Belanja Pegawai Beratkan Pemda*. Investor.Id. <https://investor.id/business/289773/pembatasan-belanja-pegawai-beratkan-pemda.%0A%0A>
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal

- di Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017). *Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2), 256-268. <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/429>
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12-22.
- Yahya, A. (2020). Peran Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dipengaruhi Oleh Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi. *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 5(02), 113.